

**DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN TERTIB
NIAGA
(AUDITED)**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan (*Audited*) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2020

Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,



Veri Anggrijono

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
Laporan Realisasi Anggaran	3
Neraca	4
Laporan Operasional	5
Laporan Perubahan Ekuitas	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7
Penjelasan Umum	7
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	27
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	53
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	59
Pengungkapan Penting Lainnya	62
Lampiran dan Daftar	66

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan (*Audited*) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2020

Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,



Veri Anggrijono

Laporan Keuangan (*Audited*) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.27.684.986.261 atau mencapai 123,75 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.22.372.151.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp.259.012.505.551 atau mencapai 96,12 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.272.078.335.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp.853.037.620.857 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.2.073.167.142; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0.; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.814.153.482.981; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.36.810.970.734. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.1.323.894.514 dan Rp.851.713.726.343.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.26.954.555.855, sedangkan jumlah beban dari kegiatan

operasional adalah sebesar Rp.257.628.615.289 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(230.674.059.434). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.(26.308.408) dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(230.700.367.842).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp.797.107.036.429 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(230.700.367.842) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.53.979.538.466 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.231.327.519.290 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp.851.713.726.343.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2019		% thd Angg	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	22,372,151,000	27,684,986,261	123.75	30,108,160,496
JUMLAH PENDAPATAN		22,372,151,000	27,684,986,261	123.75	30,108,160,496
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	95,113,207,000	93,840,762,653	98.66	85,372,459,308
Belanja Barang	B.4	147,255,992,000	136,070,774,506	92.40	120,790,350,820
Belanja Modal	B.5	29,709,136,000	29,100,968,392	97.95	27,089,781,038
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		272,078,335,000	259,012,505,551	95.20	233,252,591,166

**DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	114.498.500
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	42.750.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	11.054.000	169.833.453
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	-	16.730.000
Piutang Bukan Pajak	C.5	262.342.317	140.209.814
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	(121.580.340)	(121.027.049)
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	C.7	140.761.977	19.182.765
Persediaan	C.8	1.921.351.165	2.575.457.490
Jumlah Aset Lancar		2.073.167.142	2.938.452.208
ASET TETAP			
Tanah	C.9	613.999.725.672	610.723.350.672
Peralatan dan Mesin	C.10	386.682.154.400	377.235.507.606
Gedung dan Bangunan	C.11	155.814.168.445	95.097.157.667
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.12	949.665.352	1.256.957.452
Aset Tetap Lainnya	C.13	1.713.091.469	1.619.451.685
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.14	(345.005.322.357)	(326.693.759.219)
Jumlah Aset Tetap		814.153.482.981	759.238.665.863
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.15	14.089.179.250	13.259.615.600
Aset Lain-Lain	C.16	67.647.238.683	62.488.869.851
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.17	(44.925.447.199)	(39.642.497.790)
Jumlah Aset Lainnya		36.810.970.734	36.105.987.661
JUMLAH ASET		853.037.620.857	798.283.105.732
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.18	450.541.194	485.216.943
Pendapatan Diterima di Muka	C.19	873.353.320	576.353.860
Uang Muka dari KPPN	C.20	-	114.498.500
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.323.894.514	1.176.069.303
JUMLAH KEWAJIBAN		1.323.894.514	1.176.069.303
EKUITAS			
Ekuitas	C.21	851.713.726.343	797.107.036.429
JUMLAH EKUITAS		851.713.726.343	797.107.036.429
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		853.037.620.857	798.283.105.732

**DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31
DESEMBER 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	26.954.555.855	30.022.647.347
JUMLAH PENDAPATAN		26.954.555.855	30.022.647.347
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	93.811.553.019	85.120.675.294
Beban Persediaan	D.3	10.370.005.354	9.349.500.997
Beban Barang dan Jasa	D.4	55.716.055.251	53.969.985.092
Beban Pemeliharaan	D.5	13.369.738.193	13.380.163.426
Beban Perjalanan Dinas	D.6	55.314.496.154	43.452.424.361
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	29.046.214.027	22.158.565.896
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	553.291	1.330.447
JUMLAH BEBAN		257.628.615.289	227.432.645.513
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(230.674.059.434)	(197.409.998.166)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(335.591.417)	(3.023.002.053)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		252.885.375	103.424.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		588.476.792	3.126.426.053
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		309.283.009	16.374.389
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		603.123.694	2.007.848.576
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		293.840.685	1.991.474.187
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(26.308.408)	(3.006.627.664)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(230.700.367.842)	(200.416.625.830)
SURPLUS/DEFISIT LO		(230.700.367.842)	(200.416.625.830)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31
DESEMBER 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	E.1	797.107.036.429	794.334.362.255
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(230.700.367.842)	(200.416.625.830)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	53.979.538.466	46.911.759
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.1	(2.223.237.874)	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.2	61.702.266.023	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.3	(5.499.415.711)	46.911.759
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.4	(73.972)	-
JUMLAH		(5.499.415.711)	46.911.759
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	231.327.519.290	203.142.388.245
EKUITAS AKHIR	E.5	851.713.726.343	797.107.036.429

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010.

Entitas berkedudukan di Gedung I Lantai 3 Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat 10110.

Mengacu kepada kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta tujuan dan sasaran sebagai penjabaran misi dan visi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, maka cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menetapkan Strategi Kebijakan :

A. Peningkatan perlindungan konsumen dalam negeri Serta pengamanan pasar domestik

- 1. Pengembangan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga, dilakukan melalui :**
 - a. Telusuran standar ukuran secara nasional dan internasional.
 - b. Penyiapan rumusan peraturan dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen

2. Peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa, dilakukan melalui :

- a. Peningkatan kegiatan pengawasan barang beredar.
- b. Peningkatan jenis barang beredar ber-SNI wajib yang diawasi.

3. Peningkatan tertib ukur, dilakukan melalui :

- a. Peningkatan UTTP yang telah memenuhi peraturan yang berlaku

B. Penataan waralaba, kemitraan usaha, distributor, keagenan, ritel, *trading house*, lembaga perlindungan konsumen dan eksportir agar masyarakat dapat terlibat secara luas dalam aktivitas perekonomian perdagangan

1. Peningkatan kelembagaan dan SDM di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga, dilakukan melalui :

- a. Peningkatan akumulasi BPSK yang terbentuk.
- b. Peningkatan akumulasi jumlah SDM Perlindungan Konsumen.

2. Optimalisasi pemberdayaan konsumen, dilakukan melalui :

- a. Peningkatan pemahaman konsumen dan tanggungjawab pengusaha.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan (*Audited*) Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan (*Audited*) adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan (*Audited*) Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan (*Audited*) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat

dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan

kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara

lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset

dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2019	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	22,372,151,000	27,684,986,261
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	22,372,151,000	27,684,986,261
Belanja		
Belanja Pegawai	75,147,466,000	95,113,207,000
Belanja Barang	163,894,829,000	147,255,992,000
Belanja Modal	28,154,101,000	29,709,136,000
Jumlah Belanja	267,196,396,000	272,078,335,000

*Realisasi
Pendapatan
Rp.27.684.986.261*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.27.684.986.261 atau mencapai 120,10 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.22.372.151.000. Pendapatan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Dari Pengelolaan BMN	-	642,213,773	-
Pendapatan Jasa	22,372,151,000	26,869,052,313	120.10
Pendapatan Lain-lain	-	173,720,175	-
Jumlah	22,372,151,000	27,684,986,261	120.10

Realisasi Pendapatan 31 Desember TA 2019 mengalami penurunan 8,05 persen dibandingkan 31 Desember TA 2018. Hal ini disebabkan oleh menurunnya semua pendapatan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Pengelolaan BMN	642,213,773	109,115,772	488.56
Pendapatan Jasa	26,869,052,313	29,672,139,529	-9.45
Pendapatan Lain-lain	173,720,175	326,905,195	-46.86
Jumlah	27,684,986,261	30,108,160,496	-8.05

Belanja

Rp.259.012.505.551

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember TA 2019 adalah sebesar Rp.259.012.505.551 atau 95,20% dari anggaran belanja sebesar Rp.272.078.335.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	95,113,207,000	93,840,762,653	98.66
Belanja Barang	147,255,992,000	136,070,774,506	92.40
Belanja Modal	29,709,136,000	29,100,968,392	97.95
Total Belanja Kotor	272,078,335,000	259,012,505,551	95.20
Pengembalian		(2,516,775,167)	-
Jumlah	272,078,335,000	256,495,730,384	94.27

Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 11,69% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran terhadap belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

*Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2019
dan 31 Desember TA 2018*

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	93,845,306,104	85,414,327,902	9.87
Belanja Barang	138,583,006,222	121,652,709,883	13.92
Belanja Modal	29,100,968,392	27,089,781,038	7.42
Jumlah	261,529,280,718	234,156,818,823	11.69

*Belanja Pegawai
Rp.93.845.306.104*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.93.845.306.104 dan Rp.85.414.327.902. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja 31 Desember TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 9,87% dari 31 Desember TA 2018.

*Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember TA 2019
dan 31 Desember 2018*

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	43,933,749,239	42,039,302,921	4.51
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	6,844,200	(100.00)
Belanja Lembur	1,138,653,000	883,858,000	28.83
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	48,772,903,865	42,484,322,781	14.80
Jumlah Belanja Kotor	93,845,306,104	85,414,327,902	9.87
Pengembalian Belanja Pegawai	(4,543,451)	(41,868,594)	(89.15)
Jumlah Belanja	93,840,762,653	85,372,459,308	9.92

*Belanja Barang
Rp.138.583.006.222*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.138.583.006.222 dan Rp.121.652.709.883. Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2019 mengalami kenaikan 13,92% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2018. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya beberapa belanja sepanjang 31 Desember TA 2019.

*Perbandingan Belanja Barang 31 Desember TA 2019 dan
31 Desember 2018*

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	18.153.382.132	15.417.980.983	17,74
Belanja Barang Non Operasional	13.548.238.397	15.560.937.351	(12,93)
Belanja Kontribusi	19.563.500	21.007.250	(6,87)
Belanja Barang Persediaan	11.179.436.393	11.710.462.708	(4,53)
Belanja Jasa	26.391.670.814	22.820.790.397	15,65
Belanja Pemeliharaan	11.449.562.056	11.769.543.349	(2,72)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	54.615.640.358	40.734.302.121	34,08
Belanja Perjalanan Luar Negeri	3.225.512.572	3.617.685.724	(10,84)
Jumlah Belanja Kotor	138.583.006.222	121.652.709.883	13,92
Pengembalian Belanja	(2.512.231.716)	(862.359.063)	191,32
Jumlah Belanja	136.070.774.506	120.790.350.820	12,65

Belanja Modal
Rp.29.100.968.392

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.29.100.968.392 dan Rp.27.089.781.038 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 7,42% dibandingkan 31 Desember TA 2018 disebabkan oleh penambahan anggaran untuk belanja modal pada seluruh Satker di lingkungan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.054.636.130	24.245.393.610	3,34
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.083.562.478	2.463.488.164	(15,42)
Belanja Modal Lainnya	1.962.769.784	380.899.264	415,30
Jumlah Belanja Kotor	29.100.968.392	27.089.781.038	7,42
Jumlah Belanja	29.100.968.392	27.089.781.038	7,42

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp.25.054.636.130

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember TA 2019 adalah sebesar Rp.25.054.636.130, mengalami kenaikan sebesar 3,34% bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember TA 2018 sebesar Rp.24.245.393.610. Hal ini disebabkan oleh penambahan anggaran atas belanja modal peralatan dan mesin.

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp.2.083.562.478*

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.2.083.562.478 dan Rp.2.463.488.164.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
31 Desember TA 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A 2018	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	2.083.562.478	2.463.488.164	-18,23
Jumlah Belanja Kotor	2.083.562.478	2.463.488.164	-18,23
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	2.083.562.478	2.463.488.164	-18,23

*Belanja Modal
Lainnya
Rp.1.962.769.784*

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.962.769.784 dan Rp.380.899.264.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.114.498.500 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I tersaji pada tabel berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018*

No	Uraian	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	0	114.498.500	(114.498.500)	(100)
	Jumlah	0	144.498.500	(114.498.500)	(100)

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.42.750.000. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember TA
2019 dan 31 Desember TA 2018*

No	Uraian	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	0	42.750.000	(42.750.000)	(100)
	Jumlah	0	42.750.000	(42.750.000)	(100)

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp.11.054.000*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 masing-masing sebesar Rp.11.054.000 dan Rp.169.833.453.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018

No	Uraian	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	11.054.000	169.833.453	(158.779.453)	(93.49)
	Jumlah	11.054.000	169.833.453	(158.779.453)	(93.49)

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Ditjen PKTN

Satuan Kerja	31-12-2019 (Rp)	Penyetoran/ Pembayaran	NTPN	Tgl Setor	Saldo (Rp)
Set. Ditjen PKTN	11.054.000	0	-	-	11.054.000
Jumlah	11.054.000	0	-	-	11.054.000

Catatan:

- Kas Lainnya dan Setara Kas pada Set. Ditjen PKTN sebesar Rp.11.054.000 merupakan uang duka yang masih ditahan oleh Bendahara Pengeluaran dikarenakan terdapat sengketa pada ahli waris.

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp.0*

C.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.16.730.000, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus

Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018*

No	Uraian	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	0	16.730.000	(16.730.000)	(100)
	Jumlah	0	16.730.000	(16.730.000)	(100)

*Piutang Bukan
Pajak
Rp.262.342.317*

C.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 masing-masing sebesar Rp.262.342.317 dan Rp.140.209.814 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Rincian Piutang Bukan Pajak tersaji pada tabel berikut:

*Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018*

No	Uraian	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	262.342.317	140.209.814	122.132.503	87,11
	Jumlah	262.342.317	140.209.814	122.132.503	87,11

Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebesar Rp.262.342.317 terdiri dari:

- a. Piutang Bukan Pajak pada Sekretariat Ditjen PKTN sebesar Rp.7.955.774 terdiri dari:
 - Kelebihan belanja tunjangan khusus pegawai (tunjangan kinerja) bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.7.955.774.
- b. Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Metrologi sebesar Rp.57.945.830 terdiri dari:
 - Kelebihan belanja tunjangan khusus pegawai (tunjangan kinerja) bulan Desember TA 2019

sebesar Rp.1.874.963.

- Kelebihan belanja perjalanan dinas TA 2018 yang belum disetorkan dari unit-unit sebesar Rp.56.070.867.

c Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Standalitu sebesar Rp.19.974.016 terdiri dari:

- Kelebihan belanja tunjangan khusus pegawai (tunjangan kinerja) bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.12.917.116.
- Kelebihan belanja uang makan pegawai bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.7.056.900.

d Piutang Bukan Pajak pada BSML Regional I Medan sebesar Rp.830.330 terdiri dari:

- Kelebihan belanja tunjangan khusus pegawai (tunjangan kinerja) bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.40.197.
- Kelebihan belanja gaji pegawai PPNPN bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.790.133.

e Piutang Bukan Pajak pada BSML Regional II Yogyakarta sebesar Rp.413.189 terdiri dari:

- Kelebihan belanja tunjangan khusus pegawai (tunjangan kinerja) bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.296.794.
- Kelebihan belanja gaji pegawai PPNPN bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.116.395.

f Piutang Bukan Pajak pada BSML Regional III Banjarmasin sebesar Rp.1.047.088 terdiri dari:

- Kelebihan belanja tunjangan khusus pegawai (tunjangan kinerja) bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.135.468.
- Kelebihan belanja gaji pegawai PPNPN bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.138.320.
- Kelebihan belanja uang makan pegawai bulan

Desember TA 2019 sebesar Rp.773.300.

g Piutang Bukan Pajak pada BSML Regional IV Makassar sebesar Rp.399.229 terdiri dari:

- Kelebihan belanja tunjangan khusus pegawai (tunjangan kinerja) bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.140.882.
- Kelebihan belanja gaji pegawai PPNPN bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.258.347.

h Piutang Bukan Pajak pada Balai Kalibrasi sebesar Rp.52.750.000 terdiri dari:

- Piutang PNPB Layanan Kalibrasi Desember TA 2019 sebesar Rp.52.750.000

i Piutang Bukan Pajak pada Balai PMB sebesar Rp.121.026.861 terdiri dari:

No	Nama	No. SPK	Tgl. SPK	Rupiah
1	PT World Star Jaya	1872-PN	21-11-2013	30.238.620
2	PT Galuh Putra Group	0895-PN	26-06-2014	530.784
3	PT Galuh Putra Group	0949-PN	07-07-2014	1.415.425
4	PT Galuh Putra Group	0950-PN	07-07-2014	1.415.425
5	PT Galuh Putra Group	0951-PN	07-07-2014	1.415.425
6	PT Citra Adiatama Indonesia	0979-PN	11-07-2014	6.594.593
7	PT Yaka	0108-PN	23-01-2015	8.444.296
8	PT Yaka	0109-PN	23-01-2015	8.444.296
9	PT Putra Selatan	0265-PN	04-03-2015	1.793.407
10	PT Yaka	0110-PN	23-01-2015	9.650.623
11	PT Yaka	0111-PN	23-01-2015	9.650.623
12	FA Mata Passo	0616-PN	08-05-2015	2.420.698
13	PT Jesevin Anugerah Sejati	0693-PN	25-05-2015	1.487.804
14	PT Wanita Panca Usaha	0694-PN	25-05-2015	1.487.804
15	CV Berill	1343-PN	10-09-2015	965.062
16	Badan Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah	1386-PN	15-09-2015	1.286.750
17	CV Verimer	1225-PN	28-08-2015	160.844
18	CV Verimer	1226-PN	28-08-2015	804.219
19	PT Sarana Makmur Abadi	1876-PN	23-11-2015	4.222.148
20	PT Goodyear	2130-PN	22-12-2015	2.412.656
21	PT Goodyear	2131-PN	22-12-2015	5.307.843
22	CV Indo Dermaga	0089-PN	12-01-2016	1.721.028
23	CV Indo Dermaga	0090-PN	12-01-2016	2.581.542

24	PT Niaga Putra Bangsa	0193-PN	29-01-2016	1.182.201
25	PT Sinar Global Mulia	0266-PN	15-02-2016	1.190.244
26	PT Pos Indonesia	0667-PN	4-04-2016	1.351.087
27	PT Pos Indonesia	0668-PN	14-04-2016	1.351.087
28	CV Semesta Jaya Lestari	0674-PN	15-04-2016	386.025
29	CV Semesta Jaya Lestari	0675-PN	15-04-2016	2.573.500
30	PT Viva Teknik Mandiri	0546-PN	30-03-2016	3.538.562
31	PT Nusamas Kimia Persada	0787-PN	04-05-2016	160.844
32	CV Sentra Sukses	0905-PN	20-05-2016	2.420.698
33	CV Sentra Sukses	0904-PN	20-05-2016	2.420.698
	Jumlah	-	-	121.026.861

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak
(Rp.121.580.340)*

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 masing-masing sebesar (Rp.121.580.340) dan (Rp.121.027.049) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak tersaji pada tabel berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	(121.580.340)	(121.027.049)	(553.291)	0,46
	Jumlah	(121.580.340)	(121.027.049)	(553.291)	0,46

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada Ditjen PKTN sebesar (Rp.121.580.340) terdiri dari:

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak atas kelebihan belanja tunjangan khusus pegawai (tunjangan kinerja) sebesar (Rp.553.479) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Satker	Piutang	Lancar (0,5%)
1	Direktorat Metrologi	289.729	0
2	Balai Kalibrasi	263.750	0
Jumlah		553.479	0

Catatan:

Piutang Bukan Pajak berupa piutang tunjangan kinerja seharusnya tidak dilakukan penyisihan piutang, hal ini berdasarkan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yang menyatakan bahwa “Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dan piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya.”

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada Ditjen PKTN terdapat pada satker BPMB sebesar (Rp.121.026.861) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Piutang	Macet (100%)
1	PT World Star Jaya	30.238.620	30.238.620
2	PT Galuh Putra Group	530.784	530.784
3	PT Galuh Putra Group	1.415.425	1.415.425
4	PT Galuh Putra Group	1.415.425	1.415.425
5	PT Galuh Putra Group	1.415.425	1.415.425
6	PT Citra Adiatama Indonesia	6.594.593	6.594.593
7	PT Yaka	8.444.296	8.444.296
8	PT Yaka	8.444.296	8.444.296
9	PT Putra Selatan	1.793.407	1.793.407
10	PT Yaka	9.650.623	9.650.623
11	PT Yaka	9.650.623	9.650.623
12	FA Mata Passo	2.420.698	2.420.698
13	PT Jesevin Anugerah Sejati	1.487.804	1.487.804
14	PT Wanita Panca Usaha	1.487.804	1.487.804
15	CV Berill	965.062	965.062

16	Badan Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah	1.286.750	1.286.750
17	CV Verimer	160.844	160.844
18	CV Verimer	804.219	804.219
19	PT Sarana Makmur Abadi	4.222.148	4.222.148
20	PT Goodyear	2.412.656	2.412.656
21	PT Goodyear	5.307.843	5.307.843
22	CV Indo Dermaga	1.721.028	1.721.028
23	CV Indo Dermaga	2.581.542	2.581.542
24	PT Niaga Putra Bangsa	1.182.201	1.182.201
25	PT Sinar Global Mulia	1.190.244	1.190.244
26	PT Pos Indonesia	1.351.087	1.351.087
27	PT Pos Indonesia	1.351.087	1.351.087
28	CV Semesta Jaya Lestari	386.025	386.025
29	CV Semesta Jaya Lestari	2.573.500	2.573.500
30	PT Viva Teknik Mandiri	3.538.562	3.538.562
31	PT Nusamas Kimia Persada	160.844	160.844
32	CV Sentra Sukses	2.420.698	2.420.698
33	CV Sentra Sukses	2.420.698	2.420.698
	Jumlah	121.026.861	121.026.861

C.7 Persediaan

Persediaan
Rp.1.921.351.165

Saldo Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 masing-masing sebesar Rp.1.921.351.165. dan Rp.2.575.457.490. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember TA 2019 sebagai berikut:

Rician Persediaan 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018

No	Uraian	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	1.921.351.165	2.575.457.490	(654.106.325)	(25,40)
	Jumlah	1.921.351.165	2.575.457.490	(654.106.325)	(25,40)

Rincian Persediaan Ditjen PKTN

Jenis	TH 2019	TH 2018
Barang Konsumsi	1.802.392.375	2.490.290.980
Amunisi	49.000.000	-
Barang untuk Pemeliharaan	26.097.940	10.296.380
Suku Cadang	4.808.650	10.690.240
Bahan Baku	39.052.200	64.179.890
Jumlah	1.921.351.165	2.575.457.490

Tanah

Rp.613.999.725.672

C.8 Tanah

Saldo Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Kementerian Perdagangan per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 masing-masing sebesar Rp.613.999.725.672 dan Rp.610.723.350.672. Rincian aset Tanah secara detail per 31 Desember TA 2019 pada tabel berikut:

Rincian Tanah 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018

No	Uraian	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	613.999.725.672	610.723.350.672	3.276.375.000	0,54
	Jumlah	613.999.725.672	610.723.350.672	3.276.375.000	0,54

Rincian Nilai Tanah sebesar Rp.613.999.725.672 adalah sebagai berikut:

Rincian Nilai Tanah Ditjen PKTN

No	Satker		KIB	Luas Tanah	Nilai
1	BSML I Medan	1	2.01.02.02.999. 1	3.515	14.474.770.000
2	BSML II D.I. Yogyakarta	1	2.01.01.04.001. 1	3.220	13.451.035.000
3	BSML III Banjarmasin	1	2.01.01.04.001. 1	10.271	29.507.761.000
4	BSML IV Makassar	1	2.01.01.04.001. 1	3.247	9.819.524.000
5	Ditstandalitu	1	2.01.01.04.001. 1	19.850	253.583.250.000
6	Dit. Metrologi	1	2.01.01.04.001. 1	4.922	34.093.439.000
		2	2.01.01.01.001. 2	1165	7.810.160.000
		3	2.01.01.01.002. 1	835	7.675.320.000

		4	2.01.01.01.004. 1	9.738	225.944.971.000
		5	2.01.01.01.003. 5	124	207.389.759
		6	2.01.01.01.003. 6	129	215.752.249
		7	2.01.01.01.003. 7	136	227.459.735
		8	2.01.01.01.003. 8	137	229.132.233
		9	2.01.01.01.003. 9	132	220.769.743
		10	2.01.01.01.003. 10	134	224.114.739
		11	2.01.01.01.003. 11	122	204.044.763
		12	2.01.01.01.003. 12	122	204.044.763
		13	2.01.01.01.003. 13	113	188.992.280
		14	2.01.01.01.003. 14	116	194.009.774
		15	2.01.01.01.003. 15	141	235.822.226
		16	2.01.01.01.003. 16	135	225.787.237
		17	2.01.01.01.003. 17	444	1.273.726.195
		18	2.01.01.01.003. 18	419	1.202.007.378
		19	2.01.01.01.003. 19	313	897.919.593
		20	2.01.01.01.003. 20	165	331.045.468
		21	2.01.01.01.003. 21	155	310.982.106
		22	2.01.01.01.003. 22	155	310.982.106
		23	2.01.01.01.003. 23	143	286.906.072
		24	2.01.01.01.003. 24	165	331.045.468
		25	2.01.01.01.003. 25	498	999.155.412
		26	2.01.01.01.003. 26	134	224.114.740
		27	2.01.01.01.003. 27	2.397	4.005.651.265
		28	2.01.01.01.003. 28	1.424	4.888.640.368
		Jumlah		64.716	613.999.725.672

Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk	258.000.000
Saldo per 31 Desember 2019	258.000.000

Mutasi Tambah berupa Reklasifikasi Masuk sebesar Rp.258.000.000 terdapat pada satker Direktorat Metrologi.

*Peralatan dan
Mesin
Rp.386.682.154.400*

C.9 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah Rp.386.682.154.400. dan Rp.377.235.507.606. Rincian aset Peralatan dan Mesin secara detail per 31 Desember TA 2019 pada tabel berikut:

*Rincian Peralatan dan Mesin 31 Desember TA 2019 dan
31 Desember TA 2018*

No	Uraian	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	386.682.154.400	377.235.507.606	9.446.646.794	2,50
	Jumlah	386.682.154.400	377.235.507.606	9.446.646.794	2,50

Saldo Peralatan dan Mesin sebesar Rp.386.682.154.400 terdapat pada satker-satker berikut:

No	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.403444	Direktorat Tertib Niaga	8.059.550.628
2	090.09.412512	Direktorat Metrologi	131.443.439.087
3	090.09.447365	Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	7.191.814.575
4	090.09.447730	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	2.838.562.922
5	090.09.447755	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	3.263.408.500
6	090.09.447761	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I	11.672.746.775
7	090.09.447770	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV	9.608.224.396
8	090.09.447775	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II	12.170.561.750
9	090.09.447777	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III	10.576.797.589
10	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	14.942.582.336
11	090.09.647927	Balai Pengujian Mutu Barang	124.575.818.919
12	090.09.647931	Balai Kalibrasi	48.254.873.283
13	090.09.890563	Balai Sertifikasi	2.083.773.640
	Jumlah		386.682.154.400

*Gedung dan
Bangunan
Rp.155.814.168.445*

C.10 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah Rp.155.814.168.445 dan Rp.95.097.157.667. Terdapat kenaikan pada nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp.60.717.010.778

*Rincian Gedung dan Bangunan 31 Desember TA 2019 dan
31 Desember TA 2018*

No	Uraian	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	155.814.168.445	95.097.157.667	60.717.010.778	63,85
	Jumlah	155.814.168.445	95.097.157.667	60.717.010.778	63,85

Saldo Gedung dan Bangunan sebesar Rp.155.814.168.445 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Direktorat Metrologi	35.375.778.748
2	090.09.447761	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I	4.839.788.000
3	090.09.447770	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV	4.754.784.000
4	090.09.447775	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II	3.747.866.000
5	090.09.447777	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III	5.168.141.197
6	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	101.927.810.500
		Jumlah	155.814.168.445

*Jalan, Jaringan,
dan Irigasi
Rp.949.665.352*

C.11 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.949.665.352 dan Rp.1.256.957.452. Tidak terdapat perubahan pada nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan /sebesar Rp. 0

*Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember TA 2019
dan 31 Desember TA 2018*

No	Uraian	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	949.665.352	1.256.957.452	(307.292.100)	(24.45)
	Jumlah	949.665.352	1.256.957.452	(307.292.100)	(24.45)

Rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

- Saldo Jalan dan Jembatan sebesar Rp.194.606.000 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Direktorat Metrologi	194.606.000
	Jumlah		194.606.000

- Saldo Irigasi sebesar Rp.337.207.900 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Direktorat Metrologi	69.254.900
2	090.09.447770	BSML Regional IV Makassar	344.000
3	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	267.609.000
	Jumlah		337.207.900

- Saldo Jaringan sebesar Rp.417.851.452 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Direktorat Metrologi	26.227.452
2	090.09.447365	Set. Ditjen PKTN	55.850.000
3	090.09.447755	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	18.250.000
4	090.09.447761	BSML Regional I Medan	181.789.000
5	090.09.447777	BSML Regional III Banjarmasin	57.525.000
6	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	78.210.000
	Jumlah		417.851.452

*Aset Tetap Lainnya
Rp.1.713.091.469*

C.12 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah Rp.1.713.091.469 dan Rp.1.619.451.685. Terdapat kenaikan pada nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 33.487.847

Rincian Aset Tetap Lainnya 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018

No	Uraian	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	1.713.091.469	1.619.451.685	93.639.784	5,78
	Jumlah	1.713.091.469	1.619.451.685	93.639.784	5,78

Saldo Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.713.091.469 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.403444	Direktorat Tertib Niaga	2.834.200
2	090.09.412512	Direktorat Metrologi	253.853.301
3	090.09.447365	Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	2.818.500
4	090.09.447730	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	8.123.500
5	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	1.131.659.180
6	090.09.647927	Balai Pengujian Mutu Barang	313.802.788
		Jumlah	1.713.091.469

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan. Aset Tetap Lainnya yang terdapat di Ditjen PKTN terdiri dari:

1. Bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp.1.614.494.469
2. Bahan bercorak kesenian sebesar Rp.98.597.000

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.(345.005.322.357)*

C.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah

masing-masing Rp. (345.005.322.357) dan Rp.(326.693.759.219). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Terdapat kenaikan pada nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp.18.311.563.138

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018

No	Uraian	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	(345.005.322.357)	(326.693.759.219)	(18.311.563.138)	5,61
	Jumlah	(345.005.322.357)	(326.693.759.219)	(18.311.563.138)	5,61

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember TA 2019

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	386.682.154.400	-319.484.203.496	67.197.950.904
2	Gedung dan Bangunan	155.814.168.445	-25.097.478.190	130.716.690.255
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	949.665.352	-420.640.671	529.024.681
4	Aset Tetap Lainnya	1.713.091.469	-3.000.000	1.710.091.469
	Akumulasi Penyusutan	545.159.079.666	-345.005.322.357	200.153.757.309

C.14 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah Rp.14.089.179.250 dan Rp.13.259.615.600.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Sekretariat Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Terdapat penurunan pada nilai Aset Tak Berwujud sebesar Rp.829.563.650

Rincian Aset Tak Berwujud 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018

No	Uraian	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	14.089.179.250	13.259.615.600	829.563.650	6.26
	Jumlah	14.089.179.250	13.259.615.600	829.563.650	6.26

1. Saldo Software sebesar Rp11.838.541.050 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Direktorat Metrologi	1.121.610.250
2	090.09.447365	Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	199.760.000
3	090.09.447755	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	9.150.852.500
4	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	638.352.000
5	090.09.647927	Balai Pengujian Mutu Barang	416.771.300
6	090.09.647931	Balai Kalibrasi	49.720.000
7	090.09.890563	Balai Sertifikasi	261.475.000
Jumlah			11.838.541.050

2. Saldo Lisensi sebesar Rp.66.191.200 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Direktorat Metrologi	49.160.000

2	090.09.890563	Balai Sertifikasi	17.031.200
Jumlah			66.191.200

3. Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp.2.184.447.000 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.447365	Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	1.433.135.000
2	090.09.403444	Direktorat Tertib Niaga	185.014.500
3	090.09.447755	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	29.800.000
4	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	338.112.500
5	090.09.647931	Balai Kalibrasi	198.385.000
Jumlah			2.184.447.000

Aset Lain-Lain

Rp.67.647.238.683

C.15 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah Rp.67.647.238.683 dan Rp.62.488.869.851. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Terdapat penurunan pada nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp.5.158.368.832

Rincian Aset Lain-Lain 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018

No	Uraian	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	67.647.238.683	62.488.869.851	5.158.368.832	8,25
Jumlah		67.647.238.683	62.488.869.851	5.158.368.832	8,25

1. Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp.33.757.424.643 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.403444	Direktorat Tertib Niaga	1.446.557.457
2	090.09.412512	Direktorat Metrologi	22.111.622.813
3	090.09.447365	Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	327.229.000

4	090.09.447730	Direktorat Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa	478.309.555
5	090.09.447755	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	112.400.000
6	090.09.447761	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I	47.757.900
7	090.09.447775	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II	598.801.515
8	090.09.447777	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III	224.868.581
9	090.09.647927	Balai Pengujian Mutu Barang	8.185.265.222
10	090.09.647931	Balai Kalibrasi	28.144.000
11	090.09.890563	Balai Sertifikasi	196.468.600
Jumlah			33.757.424.643

2. Saldo Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp.33.889.814.040 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.403444	Direktorat Tertib Niaga	211.084.000
2	090.09.412512	Direktorat Metrologi	32.354.450.190
3	090.09.447365	Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	264.929.000
4	090.09.447755	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	576.455.000
5	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	390.324.000
6	090.09.890563	Balai Sertifikasi	92.571.850
Jumlah			33.889.814.040

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya*

(Rp.44.925.447.199)

C.16 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah masing-masing (Rp.44.925.447.199) dan (Rp.39.642.497.790). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember TA 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset
Lainnya 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018*

No	Uraian	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	(44.925.447.199)	(39.642.497.790)	(5.282.949.409)	13,33
	Jumlah	(44.925.447.199)	(39.642.497.790)	(5.282.949.409)	13,33

1. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar (Rp.31.899.652.715) terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.40344 4	Direktorat Tertib Niaga	(1.442.532.457)
2	090.09.41251 2	Direktorat Metrologi	(20.398.936.216)
3	090.09.44736 5	Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	(327.229.000)
4	090.09.44773 0	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	(477.038.484)
5	090.09.44775 5	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	(112.400.000)
6	090.09.44776 1	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I	(47.757.900)
7	090.09.44777 5	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II	(592.921.015)
8	090.09.44777 7	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III	(222.618.581)
9	090.09.64792 7	Balai Pengujian Mutu Barang	(8.061.328.462)
10	090.09.64793 1	Balai Kalibrasi	(20.422.000)
11	090.09.89056 3	Balai Sertifikasi	(196.468.600)
Jumlah			(31.899.652.715)

2. Saldo Akumulasi Amortisasi Software sebesar (Rp.10.981.868.951) terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Direktorat Metrologi	(739.576.649)
2	090.09.447365	Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	(199.760.000)
3	090.09.447755	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	(8.801.837.500)

4	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	(598.917.000)
5	090.09.647927	Balai Pengujian Mutu Barang	(361.444.052)
6	090.09.647931	Balai Kalibrasi	(31.075.000)
7	090.09.890563	Balai Sertifikasi	(249.258.750)
Jumlah			(10.981.868.951)

3. Saldo Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar (Rp.40.489.473) terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Direktorat Metrologi	(37.279.673)
2	090.09.890563	Balai Sertifikasi	(3.209.800)
Jumlah			(40.489.473)

4. Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan sebesar (Rp.2.003.436.060) terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Direktorat Metrologi	(1.326.505.000)
2	090.09.447365	Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	(264.929.000)
3	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	(343.068.000)
4	090.09.890563	Balai Sertifikasi	(68.934.060)
Jumlah			(2.003.436.060)

*Uang Muka dari
KPPN Rp.0*

C.17 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.114.498.500. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

No	Uraian	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	0	114.498.500	(114.498.500)	(100)
	Jumlah	0	114.498.500	(114.498.500)	(100)

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp.450.541.194*

C.18 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 masing-masing sebesar Rp.450.541.194 dan Rp.485.216.943. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018

No	Uraian	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
9	Ditjen PKTN	450.541.194	485.216.943	(34.675.749)	(7,15)
	Jumlah	450.541.194	485.216.943	(34.675.749)	(7,15)

1. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp.450.541.194 terdiri dari:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.447365	Sekretariat Ditjen PKTN	11.928.173
2	090.09.412512	Dit. Metrologi	179.771.556
3	090.09.448044	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	151.779.600
4	090.09.447761	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I	23.961.586
5	090.09.447775	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II	43.707.668
6	090.09.447777	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III	20.667.911
7	090.09.447770	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV	18.724.700
	Jumlah		450.541.194

- a. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada satker Set. Ditjen PKTN sebesar Rp.11.928.173
 - merupakan uang duka yang masih ditahan oleh Bendahara Pengeluaran karena terdapat sengketa pada ahli waris sebesar Rp.11.054.000
 - dan Rp.874.173 merupakan Biaya Telepon Bulan Desember TA 2019 yang belum diakui di Neraca.
- b. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada satker Dit. Metrologi sebesar Rp.179.771.556
 - uang makan PNS yang baru dibayarkan pada 3 bank di bulan Januari 2020, menggunakan anggaran 2020 sebesar Rp.84.289.000
 - tagihan telepon bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.963.208
 - tagihan listrik bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.78.245.948
 - kekurangan tunjangan kinerja bulan November dan bulan Desember TA 2019 1 pegawai sebesar Rp.10.568.846
 - uang makan susulan bulan November dan bulan Desember TA 2019 1 pegawai sebesar Rp.738.000
 - kekurangan gaji pegawai periode Desember TA 2019 sebesar Rp.4.966.554
- c. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada satker Dit. Standalitu sebesar Rp.151.779.600
 - merupakan beban langganan daya dan jasa (langganan listrik) bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.149.651.787
 - pembayaran langganan daya dan jasa (biaya langganan telepon) bulan Desember TA 2019 Rp.2.127.813
- d. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada satker BSML Regional I Medan sebesar Rp.23.961.586

- merupakan uang makan bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.6.782.000
 - merupakan langganan surat kabar dan majalah bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.333.000
 - merupakan biaya listrik bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.16.084.020
 - merupakan biaya telepon bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.762.566
- e. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada satker
BSML Regional II Yogyakarta sebesar Rp.43.707.668
- beban uang makan yang masih harus dibayar bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.18.168.000
 - beban gaji pokok pegawai yang masih harus dibayar bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.1.376.400
 - beban tunjangan suami/istri yang masih harus dibayar bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.44.270
 - beban tunjangan anak yang masih harus dibayar bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.17.708
 - beban tunjangan fungsional yang masih harus dibayar bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.6.930.000
 - jurnal akrual biaya langganan telepon bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.281.440
 - jurnal akrual biaya langganan listrik bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.16.889.850
- f. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya pada satker
BSML Regional III Banjarmasin sebesar Rp.20.667.911
- langganan daya dan jasa (listrik bulan Desember TA 2019) sebesar Rp.16.917.348
 - langganan daya dan jasa (tagihan air bulan Desember TA 2019) sebesar Rp.2.183.380

- langganan daya dan jasa (tagihan telepon bulan Desember TA 2019) sebesar Rp.1.567.183
- g. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya pada satker BSMML Regional IV Makassar sebesar Rp.18.724.700
 - tagihan beban langganan listrik bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.16.289.900
 - tagihan telepon dan internet bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.2.224.800
 - tagihan beban langganan Koran “Fajar” dan “Kompas” bulan Desember TA 2019 sebesar Rp.210.000

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp.873.353.320*

C.19 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.873.353.320 dan Rp.576.353.860. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Desember TA 2019 dan Desember TA 2018

No	Uraian	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen PKTN	873.353.320	576.353.860	296.999.460	51,53
	Jumlah	873.353.320	576.353.860	296.999.460	51,53

Saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka sebesar Rp.873.353.320 terdapat pada satker-satker berikut:

No.	Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	090.09.412512	Dit. Metrologi	538.197.092
2	090.09.447761	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I	138.008.000
3	090.09.447775	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II	69.205.000
4	090.09.647927	Balai Pengujian Mutu Barang	127.943.228
Jumlah			873.353.320

a. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada satker Dit. Metrologi sebesar Rp.538.197.092 merupakan pendapatan atas

- pelayanan 425253 dibayar dimuka yang belum selesai sertifikat per 31 Desember TA 2019 sebesar Rp.185.650.000.
- pendapatan atas sewa lahan kantor kas bank bjb selama 3 tahun mulai 1 November TA 2019 dengan sebesar Rp.302.096.092
- untuk sewa atm bjb sebesar Rp.21.211.000
- pelayanan 425284 yang belum selesai sertifikat per 31 Desember TA 2019 sebesar Rp.29.240.000

b. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada satker BSML Regional I Medan sebesar Rp.138.008.000 merupakan pendapatan jasa kalibrasi yang belum selesai pelaksanaannya pada tahun 2018, dikarenakan alat standar yang akan di kalibrasi tersebut sampai saat ini belum di terima oleh satker BSML Regional I.

c. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada satker BSML Regional II Yogyakarta sebesar Rp.69.205.000 merupakan pendapatan jasa kalibrasi dan verifikasi diterima dimuka.

d. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada satker BPMB sebesar Rp.127.943.228

merupakan pendapatan atas jasa pengujian yang belum selesai pelaksanaannya pada bulan juni tahun 2019.

Ekuitas

Rp.851.713.726.343

C.20 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.851.713.726.343 dan Rp.797.107.036.429. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNBP
Rp.26.954.555.855*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah sebesar Rp.26.954.555.855 dan Rp.30.040.308.859. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018*

URAIAN	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	26.954.555.855	30.040.272.387	(10)
Pendapatan Lain-Lain	0	36.472	(100)
Jumlah	26.954.555.855	30.040.308.859	(10)

Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari pemindahtanganan BMN, Pendapatan Jasa berasal dari jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Hasil Tipikor berasal dari hasil denda dan sebagainya, Pendapatan Iuran dan Denda berasal dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, sedangkan pendapatan lain-lain berasal dari penerimaan kembali belanja Pegawai dan Barang TAYL serta penerimaan kembali Persekot/Uang Muka Gaji.

*Beban Pegawai
Rp.93.811.553.019*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.93.811.553.019 dan Rp.85.120.675.294. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018

URAIAN	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	30.593.926.274	28.669.625.940	6,71
Beban Pembulatan Gaji	465.073	406.926	14,29
Beban Tunjangan-tunjangan	9.303.479.219	9.152.595.461	1,65
Beban Uang Makan PNS	4.024.884.800	3.935.797.400	2,26
Beban Gaji pokok Pejabat Negara	-	6.844.200	-100,00
Beban Uang Honor Tetap	-	337.550	-100,00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus)	48.750.144.653	42.471.209.817	14,78
Beban Uang Lembur	1.138.653.000	883.858.000	28,83
Jumlah	93.811.553.019	85.120.675.294	10,21

*Beban Persediaan
Rp.10.370.005.354*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.10.370.005.354 dan Rp.9.349.500.997. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018

URAIAN	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	8.537.144.089	7.244.683.572	17,84
Beban Persediaan pita cukai, meterai dan leges	0	31.712.500	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Baku	1.701.466.210	1.949.103.725	(12,71)
Beban Persediaan Lainnya	131.395.055	124.001.200	5,96
Jumlah	10.370.005.354	9.349.500.997	10,92

*Beban Barang dan
Jasa
Rp.55.716.055.251*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.55.716.055.251 dan Rp.53.969.985.092. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember TA 2019
dan 31 Desember TA 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	18.152.754.297	15.418.719.333	17,73
Beban Barang Non Operasional	11.122.193.397	15.560.937.351	(28,52)
Beban Jasa	12.533.923.546	9.198.557.633	36,26
Beban Jasa Lainnya	13.902.308.241	13.664.823.225	1,74
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	4.875.770	126.947.550	(96,16)
Jumlah	55.716.055.251	53.969.985.092	3,24

*Beban
Pemeliharaan
Rp.13.369.738.193*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.13.369.738.193 dan Rp.13.380.163.426. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan hampir pada semua beban pemeliharaan. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember TA 2019 dan
31 Desember TA 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.529.268.438	5.156.707.011	7,22
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.093.983.014	6.328.916.909	(3,71)
Beban Pemeliharaan Jaringan	24.000.000	152.100.000	(84,22)
Beban Persediaan Bahan Pemeliharaan	240.932.341	281.636.277	(14,45)
Beban Persediaan Suku Cadang	1.481.554.400	1.443.753.229	2,62
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	17.050.000	(100,00)
Jumlah	13.369.738.193	13.380.163.426	(0,08)

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp.55.314.496.154*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.55.314.496.154 dan Rp.43.452.424.361. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember TA 2019
dan 31 Desember TA 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	36.266.553.640	27.792.802.851	30,49
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.720.507.300	2.849.004.000	-4,51
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.570.443.885	4.800.625.168	57,70
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.910.678.957	4.486.731.561	31,74
Beban Belanja Biasa - Luar Negeri	2.602.705.644	3.304.813.187	-21,24
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	243.606.728	218.447.594	11,52
Jumlah	55.314.496.154	43.452.424.361	27,30

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.29.046.214.027*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah

masing-masing sebesar Rp.29.046.214.027 dan Rp.22.158.565.896. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	18.003.823.846	14.984.708.300	20,15
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.164.449.688	6.074.998.962	67,32
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	98.790.465	230.886.214	(57,21)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.000.000	191.458.516	(98,43)
Jumlah Penyusutan	28.270.063.999	21.482.051.992	(68,18)
Beban Amortisasi Software	627.482.951	639.471.980	(1,87)
Beban Penyusutan aset lain-lain	148.667.077	37.041.924	301,35
Jumlah Amortisasi	776.150.028	676.513.904	14,73
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	29.046.214.027	22.158.565.896	(53,45)

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp.553.291*

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.553.291 dan Rp.1.330.447. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	553.291	1.330.447	(58,41)
Jumlah	553.291	1.330.447	(58,41)

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.603.123.694*

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember TA 2019
dan 31 Desember TA 2018*

URAIAN	TA 2019	TA 2018	NAIK (TURUN) %
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	1.651.114	165.659.846	(99,00)
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	41.423.305	45.293.212	(8,54)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	538.615.130	1.783.152.510	(69,79)
Penerimaan kembali belanja modal TAYL	21.434.145		
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	603.123.694	1.994.105.568	(69,75)

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.797.107.036.429

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.797.107.036.429 dan Rp.794.334.362.255.

Defisit LO
Rp.(230.700.367.842)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah sebesar Rp.(230.700.367.842) dan Rp.(200.416.625.830). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Rp.(5.499.415.711)

E.3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah sebesar Rp.(5.499.415.711) dan Rp.46.911.759. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai, akumulasi penyusutan peralatan dan mesin serta akumulasi penyusutan gedung

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 31 Desember Tahun 2019

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	(5.499.415.711)
Jumlah	(5.499.415.711)

Koreksi Lain-Lain
Rp.(73.972)

E.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah sebesar Rp.(73.972) dan Rp.0. Koreksi ini merupakan

koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	(73.972)
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	(73.972)

*Transaksi Antar Entitas
Rp.231.327.519.290*

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.231.327.519.290 dan Rp.203.142.388.245 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	27.684.986.261
Ditagihkan ke Entitas Lain	(259.012.505.551)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(231.327.519.290)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember TA 2019, DDEL sebesar

Rp.27.684.986.261 sedangkan DKEL sebesar
Rp.(259.012.505.551).

Ekuitas Akhir

Rp.851.713.726.343

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.851.713.726.343 dan Rp.797.107.036.429.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH

TANGGAL NERACA

Tidak ada

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pada Tahun 2019 sampai dengan Semester II oleh Inspektorat Jenderal Tanggal 9-11 Februari Tahun 2019 pada Satuan kerja Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga masih terdapat beberapa hal yang harus dicatatkan, diurutkan sesuai dengan satuan kerja unit eselon II masing-masing:

1. Sekretariat Ditjen PKTN

- Terdapat Saldo Kas di Bendahara Lainnya dan Utang Kepada pihak ketiga sebesar Rp.11.054.000,- atas uang duka yang masih ditahan oleh bendahara pengeluaran karena terdapat sengketa pada ahli waris yang merupakan saldo tahun anggaran 2015.

- Terkait dengan Rekon SP2D Belanja Modal (53) dikarenakan adanya kesalahan MAK yang didalamnya terdapat 2 Mata Anggaran (Belanja 53 Rp.7.128.000,- dan 52 sebesar Rp.52.064.100,-) yang menjadi 1 SPM, dan tidak bias di revisi.

2. Direktorat Tertib Niaga

- Terdapat selisih sebesar Rp.109.815.200,- dan Rp.137.054.500,- karena terdapat renovasi ruang rapat kerja direktur dan renovasi gudang penyimpanan senjata

dimana seharusnya renovasi tersebut diserahkan ke biro umum namun ditolak karena kesalahan prosedur pengajuan ke biro umum. Di dalam renovasi tersebut terdapat pembelian barang berupa brankas sebesar Rp.49.335.000,- dan disarankan di input di simak Karena dapat dikategorikan peralatan dan mesin sedangkan sisanya dilakukan jurnal pada aplikasi SAIBA.

3. BSML Regional I Medan

- Terdapat Jurnal Penyesuaian yang dianggap tidak lazim yaitu:

1. 133211 (D) Gedung dan Bangunan Belum Diregister
2. 523111 (K) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Jurnal Penyesuaian ini terjadi dikarenakan kesalahan pengkodefikasian akun belanja untuk pengadaan Logo pada BSML Regional I dan Sticker One Way BSML Regional I yang pada awalnya dikodefikasikan pada belanja modal (53) sementara seharusnya merupakan belanja barang (52) senilai Rp.23.650.000,- karena nilainya tidak memenuhi standar kapitalisasi asset.

4. BSML Regional IV Makassar

1. Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) atas Aset Tak Berwujud BSML Regional IV Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
2. Lelang barang inventaris dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar

berdasarkan Risalah Lelang Nomor:1196/72/2019 tanggal 21 Oktober 2019.

3. Laporan Hasil Inventaris dan Penilaian BMN atas Gedung dan Bangunan; dan jalan, Jembatan, Bangunan Air berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Nomor LHIP-630/REV/WKN.15/KNL.02/2019 tanggal 31 Desember 2019.

4. Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN atas Gedung dan Bangunan berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Nomor: LHIP-008/WKN.15/KNL.02/2019 tanggal 30 Desember 2019.

5. Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN atas Tanah Berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Nomor: LHIP-100/REV/WKN.15/KNL.02/2019 tanggal 27 November 2019.

5. Direktorat Standalitu

1. Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2019 sebesar Rp.558.140.976,- namun diajukan sebesar Rp.545.325.444,-. Atas kelebihan pengajuan sebesar Rp.12.815.532,- yang dikompensasikan dengan pembayaran tunjangan kinerja Bulan Januari 2020, yang dicatat dalam jurnal umum pada Aplikasi SAIBA.

2. Pembayaran Uang Makan Pegawai Bulan Desember 2019 sebesar Rp.56.283.350,- namun diajukan sebesar Rp.49.226.450,-. Atas kelebihan pengajuan sebesar Rp.7.056.900,- yang Pengembalian Belanjanya dilakukan pada Bulan Januari 2020, yang dicatat dalam jurnal umum pada Aplikasi SAIBA.

3. Pembayaran tagihan listrik dan telepon Bulan Desember 2019 ditagihkan ke Bulan Januari 2020 sebesar Rp.149.651.787,- (Tagihan Listrik PLN) dan Rp.2.127.813,- (Tagihan Telepon) dan dicatat dalam jurnal umum pada Aplikasi SAIBA.

4. Terkait dengan pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN antara Aplikasi SIMAN dan SIMAK BMN, khusus untuk kelompok Barang Bangunan Terbuka Lainnya, Bangunan Parkir Terbuka Permanen, Jalan Khusus Khusus Lainnya, Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan dan Bangunan Bak Kontrol/Man Hole dilakukan koreksi pencatatan manual pada Aplikasi SIMAK BMN sehingga saldo akhirnya menjadi nol (0).

Lampiran A1

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember TA 2019

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER TA 2019					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	8=5+6+7	9=4-8
132111	Peralatan dan Mesin	386.682.154.400	317.015.366.187	16.408.620.700	-13.939.783.391	319.484.203.496	67.197.950.904
30101	ALAT BESAR DARAT	4.784.901.500	4.778.651.500	2.500.000	-	4.781.151.500	3.750.000
30103	ALAT BANTU	4.001.539.528	3.908.407.972	25.431.639	-	3.933.839.611	67.699.917
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	15.045.181.637	14.751.975.948	840.518.776	-2.577.593.057	13.014.901.667	2.030.279.970
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	32.053.050	21.258.988	10.547.499	-	31.806.487	246.563
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	1.320.049.200	504.425.950	104.267.029	-	608.692.979	711.356.221
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	370.492.500	237.403.510	18.744.137	32.708.000	288.855.647	81.636.853
30303	ALAT UKUR	21.883.023.050	21.654.700.682	477.027.017	-1.290.221.300	20.841.506.399	1.041.516.651
30401	ALAT PENGOLAHAN	919.794.079	661.423.301	107.383.449	-1.569.000	767.237.750	152.556.329
30501	ALAT KANTOR	10.315.801.771	7.774.809.943	833.860.133	-151.718.000	8.456.952.076	1.858.849.695
30502	ALAT RUMAH TANGGA	17.871.980.022	14.042.212.333	1.280.922.805	-795.188.308	14.527.946.830	3.344.033.192
30601	ALAT STUDIO	2.958.252.210	2.087.675.756	159.591.458	-8.723.300	2.238.543.914	719.708.296
30602	ALAT KOMUNIKASI	1.917.570.026	977.019.608	279.693.167	-37.827.958	1.218.884.817	698.685.209
30603	PERALATAN PEMANCAR	1.268.192.500	478.686.925	112.885.226	-25.279.500	566.292.651	701.899.849
30701	ALAT KEDOKTERAN	6.781.819.618	6.557.678.559	59.246.152	-7.291.731	6.609.632.980	172.186.638
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	81.809.250	73.629.250	1.148.000	-	74.777.250	7.032.000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	200.250.843.748	179.968.302.155	5.030.738.295	-5.720.541.417	179.278.499.033	20.972.344.715

30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	21.240.992.219	12.505.170.254	1.236.135.228	-12.825.940	13.728.479.542	7.512.512.677
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	4.715.040.400	2.201.890.033	310.465.363	-91.753.549	2.420.601.847	2.294.438.553
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	3.083.816.350	2.954.735.580	14.228.804	-5.627.600	2.963.336.784	120.479.566
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	329.615.300	281.215.300	2.420.000	-	283.635.300	45.980.000
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7.074.679.869	5.679.407.322	401.615.994	-67.590.000	6.013.433.316	1.061.246.553
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	3.063.526.434	2.383.081.889	157.664.791	-205	2.540.541.680	522.984.754
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	28.778.934.510	12.285.881.466	2.231.547.959	-20.621.000	14.496.808.425	14.282.126.085
30901	SENJATA API	1.716.000.000	-	85.800.000	-	85.800.000	1.630.200.000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	1.680.020.811	1.680.020.811	-	-	1.680.020.811	-
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	715.570.175	473.387.688	92.197.701	-	565.585.389	149.984.786
31001	KOMPUTER UNIT	15.416.424.793	12.024.044.618	1.722.323.187	-2.298.475.101	11.447.892.704	3.968.532.089
31002	PERALATAN KOMPUTER	6.631.623.950	5.422.752.533	641.108.084	-849.259.900	5.214.600.717	1.417.023.233
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	7.794.000	7.794.000	-	-	7.794.000	-
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	62.813.400	22.384.255	6.038.744	-10.179.730	18.243.269	44.570.131
31301	SUMUR	177.408.000	118.583.241	16.807.074	-	135.390.315	42.017.685
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	146.850.000	4.895.000	9.964.821	-	14.859.821	131.990.179
31502	ALAT PELINDUNG	2.530.000	759	548.167	-	1.307.167	1.222.833
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	679.749.600	190.098.832	54.852.674	-	244.951.506	434.798.094
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	483	483	-	-	483	-

31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1.292.227.900	237.768.985	80.397.327	-	318.166.312	974.061.588
31901	PERALATAN OLAH RAGA	62.750.000	62.750.000	-	-	62.750.000	-
133111	Gedung dan Bangunan	155.814.168.445	9.106.687.238	10.150.783.553	5.840.007.399	25.097.478.190	130.716.690.255
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	146.707.971.445	8.718.282.248	9.692.828.862	5.631.004.949	24.042.116.059	122.665.855.386
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	8.732.180.000	357.241.695	436.329.155	208.107.145	1.001.677.995	7.730.502.005
40401	TUGU/TANDA BATAS	374.017.000	31.163.295	21.625.536	895.305	53.684.136	320.332.864
134111	Jalan dan Jembatan	194.606.000	373.771.300	64.868.667	-276.468.300	162.171.667	32.434.333
50101	JALAN	194.606.000	373.771.300	64.868.667	-276.468.300	162.171.667	32.434.333
134112	Irigasi	337.207.900	21.090.303	23.055.395	26.348.673	70.494.371	266.713.529
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	69.598.900	10.082.445	2.984.720	7.250.518	20.317.683	49.281.217
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	267.609.000	-	20.070.675	30.106.013	50.176.688	217.432.312
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	-	11.007.858	-	-11.007.858	-	-
134113	Jaringan	417.851.452	176.844.191	10.527.275	603.167	187.974.633	229.876.819
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	26.227.452	12.909.354	1.615.799	-	14.525.153	11.702.299
50307	INSTALASI PERTAHANAN	-	-	-	603.167	603.167	-603.167
50309	INSTALASI PENGAMAN	78.210.000	17.597.250	3.910.500	-	21.507.750	56.702.250
50310	INSTALASI LAIN	113.375.000	113.375.000	-	-	113.375.000	-
50402	JARINGAN LISTRIK	200.039.000	32.962.587	5.000.976	-	37.963.563	162.075.437
135121	Aset Tetap Lainnya	124.597.000	-	3.000.000	-	3.000.000	121.597.000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	124.597.000	-	3.000.000	-	3.000.000	121.597.000

166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	33.753.399.643	26.500.713.598	125.953.472	5.272.985.645	31.899.652.715	1.853.746.928
30101	ALAT BESAR DARAT	2.990.000	2.990.000	-	-	2.990.000	-
30103	ALAT BANTU	9.969.300	26.448.600	-	-16.479.300	9.969.300	-
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	9.620.915.900	12.159.850.144	1.271.072	-2.541.476.387	9.619.644.829	1.271.071
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	980.000	980.000	-	-	980.000	-
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	512.000	33.220.000	-	-32.708.000	512.000	-
30303	ALAT UKUR	1.438.278.300	227.472.200	-	1.210.806.100	1.438.278.300	-
30401	ALAT PENGOLAHAN	1.569.000	17.770.000	-	-16.201.000	1.569.000	-
30501	ALAT KANTOR	492.847.851	581.323.051	-	-88.475.200	492.847.851	-
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1.212.016.708	394.895.040	6.122.100	801.709.568	1.202.726.708	9.290.000
30601	ALAT STUDIO	81.808.000	123.615.300	600.000	-43.007.300	81.208.000	600.000
30602	ALAT KOMUNIKASI	67.082.984	22.294.980	-	44.788.004	67.082.984	-
30603	PERALATAN PEMANCAR	66.060.000	24.760.500	-	41.299.500	66.060.000	-
30701	ALAT KEDOKTERAN	7.291.731	6.660.000	-	631.731	7.291.731	-
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	12.646.149.567	8.457.737.600	2.084.375	4.181.155.717	12.640.977.692	5.171.875
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	741.528.150	635.571.106	22.794.284	12.825.940	671.191.330	70.336.820
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	309.140.375	150.816.332	15.892.429	91.753.549	258.462.310	50.678.065
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	73.261.100	20.411.100	-	52.850.000	73.261.100	-
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	205.000	-	-	205.000	205.000	-
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI	22.279.000	1.698.000	-	20.581.000	22.279.000	-

	KALIBRASI & INSTRUMENTASI						
31001	KOMPUTER UNIT	3.346.644.048	2.576.745.384	5.022.417	761.163.747	3.342.931.548	3.712.500
31002	PERALATAN KOMPUTER	1.084.926.899	287.694.489	-	797.232.410	1.084.926.899	-
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10.179.730	-	-	10.179.730	10.179.730	-
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	149.475.000	149.475.000	-	-	149.475.000	-
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	-	688.000	-	688.000	-688.000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	2.367.289.000	583.038.775	70.875.628	-	653.914.403	1.713.374.597
50307	INSTALASI PERTAHANAN	-	15.245.997	603.167	-15.849.164	-	-
JUMLAH		577.323.984.840	353.194.472.817	26.786.809.062	-3.076.306.807	376.904.975.072	200.419.009.768